

Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polres Pelalawan

Marta Christina Marpaung* , Sutinah, Sri Winarsi, Prawitra Thalib

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: marpaungmartaa@gmail.com

Keywords:

Information Technology;
Violence Against Women
And Children; Pelalawan
Police Resort

Abstract

This research evaluates the role of information technology in the prevention and handling of violence against women and children at the Pelalawan Police Resort. Violence against these vulnerable groups is a social issue requiring swift and effective intervention. Therefore, information technology emerges as a strategic solution to support the detection, reporting, and follow-up processes in violence cases. This research employs qualitative methods with in-depth interviews and direct observation at the Pelalawan Police Resort to explore the implementation of information technology and its supporting and inhibiting factors. The findings indicate that online reporting applications, integrated databases, and internal communication systems accelerate coordination and officer responsiveness in managing violence cases. Additionally, technology is used for public education through digital campaigns that raise awareness of prevention importance. Key challenges include human resource preparedness and technological infrastructure limitations. Thus, the study recommends enhancing training for police personnel and developing technological infrastructure to optimize these functions. In conclusion, information technology plays a crucial role in sustainably reducing violence against women and children in the Pelalawan region.

Kata Kunci:

Teknologi Informasi;
Kekerasan Terhadap
Perempuan Dan Anak;
Polres Pelalawan

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Kekerasan terhadap kelompok rentan ini menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Maka dari itu, teknologi informasi hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung proses deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut kasus kekerasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di Polres Pelalawan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi informasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan online, basis data terpadu, dan sistem komunikasi internal mempercepat koordinasi dan respons petugas dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk edukasi masyarakat melalui kampanye digital yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. Kendala utama ditemukan pada kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi personel kepolisian dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Kesimpulannya, teknologi informasi memegang peranan penting dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan di wilayah Pelalawan.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Polres Pelalawan yang memiliki kerentanan sosial cukup tinggi. Laporan kekerasan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas bentuk kekerasan. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok

yang rentan karena keterbatasan akses, pengetahuan, dan perlindungan hukum. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru terungkap setelah korban mengalami dampak yang berat secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan. Peran teknologi informasi hadir sebagai salah satu instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut (Barus et al. 2025; Meslawika et al. 2025; Nurria et al. 2026; Sinaga et al. 2024; Wahyudi 2026).

Kabupaten Pelalawan memiliki karakteristik geografis yang cukup beragam dengan wilayah yang luas dan terdiri atas beberapa kecamatan yang jaraknya relatif jauh dari pusat pemerintahan maupun kantor kepolisian. Kondisi geografis tersebut berpotensi menjadi kendala bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan, dalam mengakses layanan pengaduan dan penanganan secara langsung. Tidak semua korban memiliki kemampuan maupun kesempatan untuk datang ke kantor kepolisian karena keterbatasan transportasi, jarak tempuh yang jauh, serta faktor keamanan dan psikologis yang sering kali menyertai korban tindak kekerasan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu alternatif yang dapat memperpendek jarak antara masyarakat dengan institusi penegak hukum melalui penyediaan layanan pengaduan yang dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa harus hadir secara fisik (Asfa et al. 2018; Rahmad et al. 2025; Rojabi et al. 2026; Sarkosi 2019; Yonata 2025).

Selain faktor geografis, aspek waktu atau jam pelayanan juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan dapat terjadi kapan saja, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja instansi pemerintah. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan akses pelaporan dan bantuan yang cepat untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar. Apabila layanan pengaduan hanya tersedia pada jam kerja tertentu, maka terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem komunikasi digital, media sosial, aplikasi pengaduan, maupun layanan telepon darurat menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh akses bantuan secara lebih cepat dan berkelanjutan (Akbar et al. 2025; Amalia 2025; S et al. 2024; Safitri et al. 2025; Yusman et al. 2024).

Faktor penghalang pelaporan kasus, seperti keterbatasan akses geografis dan keterbatasan jam pelayanan, memperburuk kondisi penanganan kasus. Banyak korban yang tidak mengetahui prosedur melapor atau merasa takut menghadap aparat penegak hukum. Aplikasi pengaduan berbasis web dapat mengatasi hambatan ini dengan menyediakan saluran pelaporan 24 jam. Teknologi juga memungkinkan bukti dikirimkan secara digital sehingga mempercepat proses investigasi. Dengan demikian, sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperpendek waktu respon. Hal ini relevan untuk diterapkan di Polres Pelalawan yang melayani wilayah cukup luas.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah penggunaan call center pengaduan. Call center merupakan pusat layanan komunikasi yang disediakan oleh suatu organisasi untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti berbagai informasi, keluhan, maupun laporan dari masyarakat melalui media telepon maupun platform komunikasi digital lainnya. Call center adalah sistem pelayanan yang memungkinkan organisasi menjalin komunikasi langsung dengan pengguna layanan guna memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kepolisian, call center

berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan awal, pemberian informasi, koordinasi penanganan kejadian, serta penghubung antara masyarakat dengan petugas yang berwenang. Keberadaan layanan pengaduan berbasis call center dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama bagi korban yang mengalami hambatan untuk datang langsung ke kantor kepolisian.

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai landasan teoritis untuk menganalisis penerimaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepolisian, khususnya pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Pelalawan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks pelayanan kepolisian, masyarakat akan lebih terdorong menggunakan sarana pengaduan berbasis teknologi apabila dianggap mampu mempermudah proses pelaporan, mempercepat respons petugas, serta memberikan rasa aman bagi korban. Sementara itu, petugas kepolisian akan lebih optimal memanfaatkan teknologi apabila sistem yang digunakan mudah dioperasikan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.

Berdasarkan data Unit PPA Polres Pelalawan periode 2022–2025, terdapat 239 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, terdiri atas 108 kasus persetubuhan anak di bawah umur, 101 kasus kekerasan terhadap anak, dan 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tingginya angka tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan sistem pelaporan yang cepat, mudah, dan mudah diakses masyarakat. Meskipun sebagian besar laporan masih disampaikan secara langsung ke kantor kepolisian, penggunaan layanan berbasis teknologi seperti call center, WhatsApp pengaduan, dan media sosial terus mengalami peningkatan. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi masyarakat sekaligus mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap pemanfaatan teknologi dalam mengakses layanan publik.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam mengatasi hambatan geografis, waktu, dan psikologis yang sering menghalangi korban untuk melapor. Adawiah (2024) menekankan bahwa pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan berbasis digital. Adi, Terttiavini, dan Marcelina (2023) mengembangkan sistem informasi pelayanan pengaduan kekerasan berbasis web yang terbukti mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kepolisian. Mufreni dan Rosida (2021) merancang sistem informasi laporan kekerasan berbasis Android dan web yang terintegrasi dengan Google Firebase, menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan digital dengan fitur notifikasi real-time dapat meningkatkan respons petugas secara signifikan. Sementara itu, Azizah dan Sulistiani (2024) serta Gardenia Luthfia (2022) menyoroti pentingnya pendampingan korban dan regulasi emosi dalam proses pemulihan, yang dapat difasilitasi melalui sistem database terpadu dan komunikasi terintegrasi antarinstansi. Annisa dan Adharani (2023) menambahkan bahwa sistem informasi berbasis website untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak efektif dalam mengoordinasikan layanan lintas sektor, sementara Khoiriyah et al. (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender online melalui platform digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun, kesenjangan (gap) yang ditemukan adalah sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengembangan sistem teknis tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi di tingkat institusi kepolisian, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Kabupaten Pelalawan. Selain itu, studi tentang penerimaan dan pemanfaatan teknologi oleh petugas kepolisian serta korban masih terbatas, sementara faktor kesiapan sumber daya manusia dan keamanan data korban dalam sistem digital belum mendapat perhatian yang memadai. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menganalisis penerimaan teknologi dari dua sisi yaitu petugas kepolisian dan masyarakat/korban sehingga memberikan gambaran komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi, eksplorasi holistik implementasi teknologi di Polres Pelalawan dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat secara simultan yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, serta rekomendasi kebijakan kontekstual untuk wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur yang mencakup penguatan kapasitas petugas, perluasan jaringan, dan pengembangan keamanan data serta pelaporan anonim untuk mendorong korban berani melapor.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem pelaporan berbasis aplikasi atau website yang dilengkapi fitur notifikasi real-time, geotagging, tombol darurat, serta penyimpanan bukti digital dapat membantu mempercepat respons aparat dan meningkatkan perlindungan korban. Selain berfungsi sebagai sarana pelaporan, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk investigasi digital, edukasi masyarakat, kampanye pencegahan, serta integrasi data dengan sistem nasional seperti SIMFONI-PPA. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, keamanan data yang kuat, peningkatan kapasitas aparat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Pelalawan, dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi yang telah diimplementasikan, faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya, serta dampaknya terhadap aksesibilitas, kecepatan respons, dan perlindungan korban. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan kajian tentang integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik berbasis kepolisian, khususnya dalam konteks perlindungan kelompok rentan, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Polres Pelalawan dan institusi kepolisian lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran teknologi informasi (TI) dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Pelalawan. Tipe penelitian ini menitikberatkan pada makna, pengalaman, dan persepsi para pelaku, korban, serta petugas,

sehingga memungkinkan peneliti menggali fenomena yang kompleks, dinamis, dan sulit diukur secara kuantitatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih adalah fenomenologis dan studi kasus dimana:

1. Fenomenologis

Menggali pengalaman subyektif para korban, keluarga, dan petugas terkait penggunaan TI dalam konteks nyata, sehingga dapat menangkap “bagaimana” teknologi dirasakan, diakses, dan dimanfaatkan.

2. Studi Kasus

Meneliti secara mendalam satu entitas, yaitu Polres Pelalawan, untuk melihat keterkaitan antara TI dan proses penanganan kasus kekerasan.

Pemilihan pendekatan penelitian ini karena dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh faktor budaya, organisasi, dan sistem teknologi; pendekatan ini memungkinkan analisis holistik pada satu institusi representatif di wilayah terpencil.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Polres Pelalawan, Provinsi Riau, dengan fokus pada:

1. Unit PPA Polres Pelalawan.
2. LSM/Yayasan yang menangani korban kekerasan.
3. Keluarga atau korban kekerasan

Alasan pemilihan Lokasi pada peneltian ini dikarenakan wilayah Pelalawan memiliki tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi (data Dinas Sosial Provinsi Riau 2022 2024) serta masih menghadapi keterbatasan akses TI, sehingga relevan untuk mengkaji inovasi digital dalam layanan kepolisian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penanganan kasus kekerasan. Jumlah subjek bersifat fleksibel sebagai berikut:

Tabel 1. Subjek penelitian

Kategori Subjek	Jumlah	Peran/ Keterlibatan
Polisi yang menangani kasus	5 Orang	Petugas lapangan, digital forensik
Perwakilan LSM/PGK	3 Orang	Pengamatan terhadap sistem pendukung
Korban & keluarga	5 Orang	Pengalaman langsung terhadap layanan digital

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Analisis Data

Data yang terkumpul (wawancara, observasi, dokumen) akan dianalisis secara kualitatif menggunakan Analisis Tematik (Thematic Analysis) menurut Braun & Clarke (2006). Proses analisis meliputi enam tahapan:

Tabel 2. Proses Analisis Data

Tahap	Deskripsi
1. Familiarisasi	Membaca dan mencatat semua transkrip wawancara serta dokumen pendukung.
2. Generasi kode awal	Membuat kode pada segmen data penting (mis. “keterlambatan respons aplikasi”, “ketidapahaman lansia”).
3. Pencarian tema	Mengelompokkan kode yang berhubungan (mis. “hambatan akses teknologi”, “keterbatasan SDM”).
4. Pemeriksaan tema	Memastikan konsistensi, relevansi, dan representativitas tema dalam keseluruhan data.

5. Definisi dan penamaan tema	Menetapkan nama tema yang jelas (contoh: “Kesenjangan Digital dalam Layanan Kemanusiaan”).
6. Pembuatan laporan	Menyusun temuan dalam narasi ilmiah yang menjelaskan peran, tantangan, serta implikasi TI pada penanganan kasus kekerasan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi Mendukung Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Polres Pelalawan

A. Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan Kasus Kekerasan

Teknologi informasi telah menjadi instrumen fundamental dalam transformasi layanan kepolisian modern, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Polres Pelalawan sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Pelalawan telah mengadopsi berbagai solusi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kasus kekerasan. Implementasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

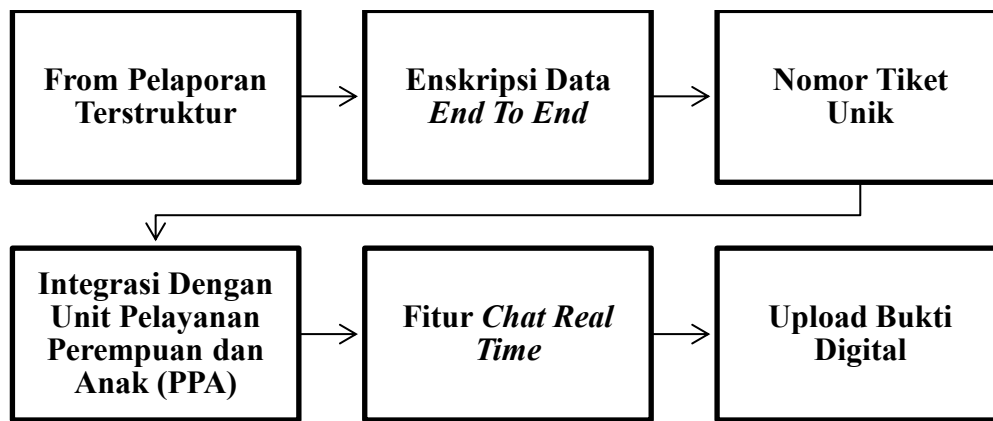
Menurut Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preanata, "Teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan kepolisian dari yang semula reaktif menjadi proaktif. Dengan sistem yang terintegrasi, kami dapat mendeteksi potensi kekerasan lebih awal dan melakukan intervensi preventif sebelum kasus menjadi lebih parah". Pernyataan ini mencerminkan komitmen Polres Pelalawan dalam memanfaatkan teknologi sebagai upaya preventif yang tidak hanya mengandalkan respons pasca-kejadian.

Transformasi digital di Polres Pelalawan didasarkan pada kebutuhan mendesak akan sistem yang mampu menangani kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. AIPDU Doni Harianto menambahkan, "Sebelum adanya integrasi teknologi, kami kesulitan dalam tracking kasus karena data tersebar di berbagai unit. Sekarang dengan sistem terpadu, koordinasi menjadi lebih efektif dan setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat".

1. Sistem Pelaporan Online

Sistem pelaporan online merupakan inovasi krusial yang telah diimplementasikan oleh Polres Pelalawan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang user-friendly dan dapat diakses melalui berbagai platform, termasuk website resmi Polres Pelalawan dan aplikasi mobile yang dikembangkan khusus. Keberadaan sistem pelaporan online ini sangat penting mengingat masih banyak korban kekerasan yang enggan melapor langsung ke kantor polisi karena berbagai kendala, termasuk rasa takut, malu, atau faktor geografis.

AIPDA Adek F menjelaskan, "Kami menyadari bahwa tidak semua korban merasa nyaman datang langsung ke kantor polisi. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem pelaporan online yang menjamin anonimitas dan keamanan data pelapor. Sistem ini telah meningkatkan jumlah laporan masuk hingga 35% dalam enam bulan pertama implementasi". Statistik ini menunjukkan betapa teknologi dapat mengurangi barrier yang selama ini menghambat korban untuk melapor.



Gambar 1. Sistem pelaporan online Polres Pelalawan

Sumber: Dokumentasi Polres Pelalawan (2024)

Sistem pelaporan online Polres Pelalawan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, antara lain:

- Form Pelaporan Terstruktur: Formulir digital yang dirancang secara khusus untuk mengumpulkan informasi detail mengenai kekerasan yang dialami, termasuk kronologi, bukti digital, dan informasi pelaku.
- Enkripsi Data End-to-End: Semua data yang dikirimkan melalui sistem dienkripsi untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pelapor.
- Nomor Tiket Unik: Setiap laporan mendapatkan nomor tiket yang dapat digunakan untuk tracking status penanganan.
- Integrasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA): Laporan yang masuk secara otomatis dialirkan ke unit PPA untuk penanganan khusus.
- Fitur Chat Real-time: Pelapor dapat berkomunikasi langsung dengan petugas PPA melalui fitur chat yang tersedia dalam sistem.
- Upload Bukti Digital: Korban dapat mengunggah bukti digital seperti foto, rekaman audio, atau dokumen pendukung lainnya.

BRIGADIR Anggun, sebagai petugas frontliner PPA, berbagi pengalamannya: "Sistem pelaporan online ini sangat membantu kami dalam memberikan layanan prima. Seringkali kami menerima laporan dari korban yang berada di lokasi terpencil atau kondisi darurat. Dengan adanya fitur GPS tracking dan komunikasi real-time, kami dapat merespons lebih cepat bahkan sebelum korban tiba di kantor polisi".

Dari perspektif masyarakat, Ibu Ratna sebagai perwakilan korban menyatakan, "Saya awalnya ragu untuk melapor karena takut diketahui banyak orang. Tapi dengan sistem online ini, saya bisa melapor dari rumah dengan aman. Petugas pun sangat responsif dan memandu saya langkah demi langkah". Testimoni ini menggarisbawahi pentingnya teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban.

Implementasi sistem pelaporan online juga didukung oleh sosialisasi masif melalui berbagai saluran komunikasi digital. Polres Pelalawan aktif menggunakan media sosial, website, dan kolaborasi dengan LSM untuk mempromosikan layanan ini. Konsistensi dalam edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan adopsi teknologi ini.

2. Basis Data Terpadu Kasus Kekerasan

Basis data terpadu kasus kekerasan merupakan backbone dari sistem perlindungan yang dibangun oleh Polres Pelalawan. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk laporan online, laporan tatap muka, data dari rumah sakit, serta informasi dari mitra LSM dan pemerintah daerah. Integrasi data ini memungkinkan Polres Pelalawan memiliki gambaran komprehensif mengenai prevalensi, pola, dan tren kekerasan di wilayah hukumnya.

AIPDA M.T. Pakpahan, yang menangani pengelolaan basis data, menjelaskan, "Basis data terpadu kami tidak hanya menyimpan data kasus, tetapi juga mampu melakukan analisis prediktif. Sistem dapat mengidentifikasi hotspot kekerasan, pola berulang pelaku, dan kelompok rentan. Informasi ini sangat berharga untuk penanganan preventif". Kapabilitas analitik ini menempatkan Polres Pelalawan di garda terdepan dalam penerapan kepolisian prediktif di Indonesia.

Alur basis data terpadu Polres Pelalawan memiliki beberapa komponen utama:

- a. Central Data Repository: Server pusat yang menyimpan semua data kasus dengan standar keamanan tinggi dan backup sistem otomatis.
- b. Data Integration Layer: Middleware yang memungkinkan sinkronisasi data dari berbagai sistem eksternal, termasuk sistem rumah sakit dan Dinas Sosial.
- c. Analytics Engine: Modul analisis yang menggunakan machine learning untuk identifikasi pola dan prediksi risiko.
- d. Dashboard Monitoring: Interface visual yang menampilkan statistik real-time untuk pimpinan dan petugas lapangan.
- e. Mobile Access Module: Aplikasi mobile yang memungkinkan petugas mengakses dan mengupdate data dari lapangan.
- f. API Gateway: Interface yang memungkinkan mitra eksternal (LSM, lembaga penelitian) mengakses data anonim untuk tujuan kolaborasi.

Dari perspektif LSM, Bapak Ahmad Fauzi dari LSM Pelalawan Peduli mengapresiasi sistem ini: "Basis data terpadu ini membantu kami dalam melakukan advokasi yang berbasis data. Kami bisa melihat tren kekerasan di wilayah tertentu dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi data antara Polres dan LSM menjadi lebih efektif".

Keunggulan basis data terpadu ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat. Sistem dapat mendeteksi pelaku berulang (repeat offender) yang mungkin beroperasi di berbagai lokasi, serta mengidentifikasi korban-korban yang mungkin mengalami kekerasan berkelanjutan namun tidak melapor karena berbagai alasan.

Ibu Siti Nurhayati dari LSM Anak Ceria Pelalawan menambahkan, "Data yang terintegrasi membantu kami mengidentifikasi anak-anak yang berisiko tinggi mengalami kekerasan. Dengan informasi ini, kami dapat melakukan pendampingan preventif sebelum terjadi kasus yang lebih serius". Proaktifitas ini merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi yang optimal.

3. Sistem Komunikasi dan Koordinasi Internal Polres

Sistem komunikasi dan koordinasi internal yang efektif merupakan fondasi bagi kesuksesan implementasi teknologi informasi di Polres Pelalawan. Polres mengembangkan sistem terpadu yang menghubungkan semua unit kerja, mulai dari PPA, Reserse, Intelijen, hingga Satuan Lalu Lintas dalam satu platform digital terintegrasi. Sistem ini memastikan

informasi mengenai kasus kekerasan dapat mengalir secara cepat dan akurat antar unit, meminimalkan delays dan miscommunication.

AIPTU Doni Harianto menjelaskan implementasi sistem ini, "Kami menggunakan platform komunikasi terenkripsi khusus untuk koordinasi internal kasus kekerasan. Setiap unit memiliki role-based access yang memastikan informasi sensitif hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang. Sistem ini mengurangi waktu respons hingga 40% dibandingkan dengan komunikasi konvensional". Efisiensi waktu ini sangat krusial dalam penanganan kasus kekerasan di mana setiap menit dapat menentukan keselamatan korban.

Sistem komunikasi internal Polres Pelalawan mencakup beberapa fitur utama:

- a. Secure Messaging Platform: Sistem pesan instan terenkripsi untuk komunikasi cepat antar petugas.
- b. Case Management System: Platform untuk tracking dan assignment kasus secara real-time.
- c. Video Conference Integration: Kemampuan melakukan rapat koordinasi virtual untuk diskusi kasus kompleks.
- d. Alert System: Notifikasi otomatis untuk kasus prioritas atau keadaan darurat.
- e. Knowledge Base: Repositori dokumen, prosedur, dan best practice penanganan kasus kekerasan.
- f. Mobile Task Force App: Aplikasi mobile untuk tim lapangan yang memungkinkan update status secara real-time.

Bapak Joko Santoso dari LSM YAKOMA Pelalawan mengamati efektivitas sistem ini: "Kami melihat koordinasi antar unit di Polres menjadi lebih baik setelah implementasi sistem digital ini. Ketika kami mengirimkan informasi mengenai kasus tertentu, respons dari berbagai unit menjadi lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik". Sinergi ini menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih solid.

Implementasi sistem komunikasi internal juga membahas aspek human factor dan change management. Polres Pelalawan melakukan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan semua petugas mampu menggunakan sistem secara optimal. AIPDA Adek F menambahkan, "Kami tidak cukup hanya memasang teknologi, tetapi juga membangun kultur digital di kalangan petugas. Regular training dan mentoring menjadi kunci keberhasilan adopsi sistem".

Dari sisi keamanan, sistem komunikasi internal dilengkapi dengan berbagai lapisan proteksi data. AIPDA M.T. Pakpahan menjelaskan, "Semua komunikasi internal dienkripsi dengan standar militer. Kami juga memiliki audit trail yang mencatat semua aktivitas dalam sistem untuk kepentingan akuntabilitas dan forensik digital". Keamanan data menjadi prioritas mengingat sensitivitas informasi kasus kekerasan.

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan

Setelah tahap pencegahan, teknologi informasi memainkan peran equally important dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi. Polres Pelalawan telah mengembangkan berbagai solusi teknologi untuk memastikan setiap kasus ditangani secara profesional, efisien, dan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik korban. Pendekatan teknologis ini tidak hanya meningkatkan efektivitas proses hukum, tetapi juga memberikan perlindungan psikologis dan dukungan rehabilitasi bagi korban.

Menurut Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preanata, "Penanganan kasus kekerasan memerlukan pendekatan multidimensional. Teknologi membantu kami mengintegrasikan

aspek penegakan hukum dengan pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Setiap korban mendapatkan treatment personalized yang didukung oleh data dan analytics". Pendekatan holistik ini menjadi standar baru dalam pelayanan kepolisian di era digital.

Transformasi dalam penanganan kasus juga tercermin dari perubahan mindset dari victim-blaming menjadi victim-centered approach. Teknologi memungkinkan Polres Pelalawan untuk memberikan perhatian lebih pada recovery dan empowerment korban, bukan hanya fokus pada aspek pidana semata.

1. Proses Deteksi dan Respons Kasus

Proses deteksi dan respons kasus kekerasan di Polres Pelalawan telah direvolusi melalui implementasi teknologi canggih yang mengintegrasikan artificial intelligence, data analytics, dan workflow automation. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kasus sejak dini, mengkategorikan tingkat urgensi, dan secara otomatis mengalokasikan resources yang tepat untuk penanganan. Proaktifitas dalam deteksi menjadi kunci untuk mencegah eskalasi kekerasan yang lebih parah.

BRIGADIR Anggun, sebagai petugas yang langsung terlibat dalam proses deteksi, menjelaskan, "Sistem kami menggunakan AI untuk menganalisis pola dari laporan yang masuk. Jika ada indikasi kekerasan berkelanjutan atau berulang, sistem akan memberikan alert khusus kepada kami. Ini membantu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin tersembunyi atau tidak dilaporkan secara lengkap". Kapabilitas deteksi cerdas ini menunjukkan evolusi kepolisian dari reactive menjadi predictive.

Proses deteksi dan respons di Polres Pelalawan mengikuti alur sistematis sebagai berikut:

- a. Multi-Channel Detection: Sistem memonitor berbagai channel untuk deteksi kasus, termasuk laporan online, media sosial, call center, dan laporan dari mitra eksternal.
- b. Triage Otomatis: AI algorithms mengkategorikan kasus berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas secara otomatis.
- c. Resource Allocation: Sistem secara otomatis mengalokasikan tim penanganan yang sesuai dengan expertise dan availability.
- d. Rapid Response Protocol: Protokol respons cepat yang diaktifkan untuk kasus darurat dengan koordinasi multi-agency.
- e. Case Tracking: Real-time tracking seluruh proses penanganan dari awal hingga penyelesaian.
- f. Feedback Loop: Sistem mengumpulkan feedback dari korban untuk evaluasi dan improvement berkelanjutan.

Dari perspektif korban, Ibu Dina berbagi pengalamannya, "Saya melapor melalui sistem online dan dalam hitungan menit sudah ada petugas yang menghubungi saya. Mereka sudah memiliki informasi dasar tentang kasus saya dan memberikan panduan langkah pertama yang harus saya lakukan. Respons yang cepat ini membuat saya merasa lebih aman". Testimoni ini menggarisbawahi bagaimana teknologi dapat menciptakan sense of security bagi korban.

Implementasi sistem deteksi dan respons juga melibatkan integrasi dengan sistem emergency response lainnya. AIPDA Adek F menjelaskan, "Sistem kami terintegrasi dengan emergency call center 110, ambulance services, dan rumah sakit rujukan. Untuk kasus kekerasan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, kami dapat mengkoordinasikan respons multi-agency secara simultan". Kolaborasi ini memastikan korban mendapatkan layanan holistik.

Dari sisi teknis, sistem deteksi menggunakan natural language processing (NLP) untuk menganalisis konten laporan dan mengidentifikasi red flags. AIPDA M.T. Pakpahan menambahkan, "Kami menggunakan semantic analysis untuk mendeteksi indikasi kekerasan dalam narasi laporan. Sistem dapat mengidentifikasi pola bahasa yang khas dari korban kekerasan, bahkan ketika mereka tidak secara eksplisit menyebutkan kekerasan". Teknologi NLP ini membantu mengungkap kasus-kasus yang tersembunyi.

2. Penggunaan Media Digital untuk Edukasi dan Penyuluhan

Pemanfaatan media digital untuk edukasi dan penyuluhan menjadi strategi proaktif Polres Pelalawan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Polres mengembangkan konten edukasi yang komprehensif dan mudah diakses melalui berbagai platform digital, termasuk website, media sosial, YouTube, dan podcast. Konten ini dirancang untuk meningkatkan awareness masyarakat, mengubah persepsi tentang kekerasan, dan memberikan informasi praktis mengenai cara melapor dan mendapatkan bantuan.

AIPTU Doni Harianto, yang memimpin divisi edukasi digital, menjelaskan, "Kami tidak hanya menunggu kasus terjadi, tetapi secara proaktif menyebarkan edukasi melalui media digital. Konten kami meliputi video tutorial, infographic, artikel, dan webinar yang disesuaikan dengan berbagai segmen audiens, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga profesional". Pendekatan segmentasi ini memastikan pesan tepat sasaran.

Strategi edukasi digital Polres Pelalawan mencakup beberapa komponen utama:

- a. Content Hub: Website khusus yang menjadi pusat semua materi edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Social Media Campaign: Campaign berkelanjutan di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan konten yang engaging dan shareable.
- c. Video Series: Serial video edukasi di YouTube yang membahas berbagai aspek kekerasan dan cara pencegahannya.
- d. Mobile Learning App: Aplikasi mobile untuk pembelajaran interaktif mengenai identifikasi kekerasan dan self-protection.
- e. Virtual Workshop: Webinar dan workshop online yang diadakan secara regular dengan narasumber ahli.
- f. Digital Comics: Komik digital untuk anak-anak yang mengajarkan tentang personal safety dalam bahasa yang mudah dipahami yang diberikan Ketika melakukan penyuluhan di beberapa sekolah unit PPA.

Ibu Elsa Mariana dari LSM Save Women Pelalawan mengapresiasi upaya ini, "Kami melihat Polres Pelalawan sangat aktif dalam edukasi digital. Konten-konten yang mereka buat sangat relevan dan mudah diakses. Kami sering berkolaborasi dalam pembuatan konten untuk memastikan perspektif gender dan child-friendly approach terwakili". Kolaborasi dengan LSM memastikan kualitas dan relevansi konten.

Dari perspektif penerima manfaat, Ibu Ratna menyatakan, "Saya sering melihat postingan dari Polres di media sosial mengenai tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Konten itu membuka mata saya bahwa apa yang saya alami memang termasuk kekerasan dan ada bantuan yang tersedia". Impact nyata dari edukasi digital terlihat dari meningkatnya awareness di masyarakat.

Polres Pelalawan juga menggunakan pendekatan data-driven dalam merancang konten edukasi. AIPDA M.T. Pakpahan menjelaskan, "Kami menganalisis data pencarian dan

engagement di media sosial untuk mengidentifikasi topik yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat. Konten kami selalu update berdasarkan tren dan isu terkini". Pendekatan analytics ini memastikan efektivitas edukasi yang dilakukan.

Implementasi edukasi digital juga melibatkan influencer dan key opinion leaders lokal untuk meningkatkan reach dan credibility. BRIGADIR Anggun menambahkan, "Kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, influencer lokal, dan religious leaders untuk menyampaikan pesan anti-kekerasan. Endorser dari figur yang dipercaya meningkatkan efektivitas pesan secara signifikan". Strategi ini menciptakan ekosistem edukasi yang komprehensif.

3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus dengan Teknologi

Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi menjadi kunci untuk memastikan kualitas dan konsistensi penanganan kasus kekerasan di Polres Pelalawan. Sistem ini dirancang untuk tracking performance indicators, mengidentifikasi gaps dalam penanganan, dan memberikan insight untuk continuous improvement. Data-driven approach dalam monitoring memungkinkan manajemen membuat keputusan yang berbasis bukti dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.

Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preatana menekankan pentingnya sistem ini, "Monitoring dan evaluasi adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Dengan dashboard real-time, saya dapat melihat performance seluruh unit dalam menangani kasus kekerasan. Kami memiliki 15 KPI yang diukur secara berkala, mulai dari waktu respons pertama hingga kepuasan korban". Keterukuran performance ini menjadi fondasi untuk improvement berkelanjutan.

Sistem monitoring dan evaluasi Polres Pelalawan memiliki beberapa fitur utama:

- Real-Time Dashboard:** Interface visual yang menampilkan live data mengenai berbagai metrik penanganan kasus.
- Performance Analytics:** Analisis mendalam mengenai efektivitas intervensi dan identifikasi best practices.
- Quality Assurance System:** Automated checklist untuk memastikan standar prosedur penanganan terpenuhi.
- Feedback Management System:** Sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis feedback dari korban dan mitra eksternal.
- Compliance Monitoring:** Tracking kepatuhan terhadap regulasi dan standard operating procedure.
- Predictive Analytics:** Prediksi trends dan potensi bottleneck dalam penanganan kasus.

Tabel 3. Key Performance Indicators (KPI) Penanganan Kasus Kekerasan di Polres Pelalawan

Kategori KPI	Indikator Spesifik	Target	Current Performance
<i>Responsiveness</i>	Waktu respons pertama	< 30 menit	22 menit
<i>Case Resolution</i>	Rasio penyelesaian kasus	> 85%	89%
<i>Victim Satisfaction</i>	Indeks kepuasan korban	> 4.0/5.0	4.3/5.0
<i>Prosecution Rate</i>	Rasio penuntutan	> 70%	74%
<i>Prevention Effectiveness</i>	Penurunan kasus berulang	< 10%	7%

Sumber: Polres Pelalawan, Laporan Kinerja Unit PPA (2024)

Dari perspektif implementasi, AIPDA Adek F menjelaskan, "Setiap petugas memiliki akses ke personal dashboard yang menampilkan performance individual mereka. Sistem juga

memberikan notifikasi ketika ada KPI yang tidak tercapai, sehingga dapat dilakukan corrective action segera". Transparency dalam performance mendorong akuntabilitas individu.

Sistem evaluasi juga melibatkan feedback mechanism dari korban dan mitra eksternal. Ibu Siti Nurhayati dari LSM Anak Ceria Pelalawan memberikan pandangannya, "Kami secara rutin diminta memberikan feedback mengenai kualitas penanganan kasus. Input kami dijadikan bahan evaluasi oleh Polres untuk improvement. Kami merasa menjadi partner yang sejajar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak". Inklusivity dalam evaluasi menciptakan sense of ownership bersama.

Monitoring tidak hanya fokus pada outcome, tetapi juga pada proses penanganan. AIPDA M.T. Pakpahan menambahkan, "Kami menggunakan process mining untuk menganalisis workflow penanganan kasus. Sistem dapat mengidentifikasi bottlenecks atau inefficiencies dalam proses yang mungkin tidak terlihat dari observasi manual". Teknologi process mining ini memberikan insight mendalam mengenai operasional.

Dari sisi keberlanjutan, sistem monitoring dirancang untuk skalabilitas dan adaptabilitas. AIPDU Doni Harianto menjelaskan, "Arsitektur sistem kami modular sehingga dapat dengan mudah ditambahkan KPI baru atau dimodifikasi sesuai kebutuhan evolving. Kami juga melakukan system upgrade setiap 6 bulan untuk memastikan teknologi selalu up-to-date". Future-proof design ini menjamin relevansi sistem jangka panjang.

C. Studi Kasus Pemanfaatan Teknologi di Polres Pelalawan

Implementasi teknologi informasi di Polres Pelalawan tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi telah terbukti memberikan dampak signifikan dalam praktik penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Studi kasus ini mengkaji secara mendalam penerapan teknologi dari perspektif multi-stakeholder, mengidentifikasi success factors, challenges, dan lessons learned yang dapat dijadikan referensi bagi institusi kepolisian lainnya.

Transformasi digital di Polres Pelalawan dimulai pada tahun 2021 dengan pilot project sistem pelaporan online. Seiring waktu, ekosistem teknologi terus berkembang mencakup basis data terpadu, sistem komunikasi internal, hingga analytics dashboard. Perjalanan transformasi ini tidak selalu mulus, namun komitmen leadership dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilannya.

Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preanata merefleksikan perjalanan ini, "Kami memulai dengan visi sederhana: membuat pelaporan kasus kekerasan lebih mudah untuk korban. Sekarang setelah 3 tahun berjalan, ekosistem teknologi kami telah berkembang jauh melampaui ekspektasi awal. Kunci keberhasilan kami adalah pendekatan incremental dan fokus pada user needs". Evolutionary approach ini meminimalkan resistensi terhadap perubahan.

Studi kasus ini akan menganalisis tiga kasus representatif yang menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah landscape penanganan kekerasan di Polres Pelalawan.

Kasus 1: Deteksi Dini dan Pencegahan Kekerasan Berkelanjutan melalui Analytics

Pada bulan Maret 2024, sistem analytics Polres Pelalawan mendeteksi pola mencurigakan dari laporan yang masuk. Terdapat beberapa laporan dari wilayah yang sama dengan karakteristik pelaku yang mirip, meskipun korban berbeda. Sistem AI mengidentifikasi ini sebagai potential serial abuse pattern dan memberikan alert khusus kepada tim PPA.

AIPDA M.T. Pakpahan, yang menerima alert ini, menjelaskan, "Sistem kami menunjukkan ada 5 laporan dalam 2 bulan terakhir dari 3 desa berbeda dengan modus operandi

yang sama. Pelaku selalu mengaku sebagai debt collector dan menggunakan intimidasi psikologis. Pattern ini mungkin tidak terdeteksi dalam analisis manual".

Tim PPA segera melakukan investigasi mendalam dan berhasil mengungkap bahwa kasus-kasus ini memang terkait dan dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat. BRIGADIR Anggun menambahkan, "Dengan informasi dari sistem, kami dapat melakukan profil pelaku dan prediksi lokasi potensial berikutnya. Ini memungkinkan kami melakukan pre-emptive action sebelum ada korban lagi".

Hasilnya, dalam waktu 3 minggu, Polres Pelalawan berhasil membongkar sindikat ini dan menangkap 4 tersangka. Dari perspektif korban, Ibu Dina yang menjadi salah satu korban menyatakan, "Saya senang pelakunya tertangkap. Yang lebih penting, saya tahu ada korban lain yang selamat karena polisi bertindak cepat setelah laporan saya". Impact dari teknologi tidak hanya menghentikan kekerasan tetapi juga mencegah korban selanjutnya.

Kasus 2: Integrasi Multi-Agency untuk Penanganan Kompleks

Kasus kedua menunjukkan bagaimana teknologi memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kasus kompleks. Seorang anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan melalui sistem online pada April 2024 memerlukan pendekatan multidimensional: medis, psikologis, hukum, dan pendidikan.

AIPTU Doni Harianto yang memimpin koordinasi kasus ini menjelaskan, "Segera setelah laporan masuk, sistem kami secara otomatis mengirimkan notifikasi ke Dinas Sosial, rumah sakit rujukan, dan LSM pendamping anak. Semua pihak memiliki akses ke case management system terkait dengan role-based access".

Kolaborasi ini sangat efektif. Ibu Siti Nurhayati dari LSM Anak Ceria Pelalawan yang terlibat dalam pendampingan korban mengapresiasi sistem ini, "Dalam kasus ini, koordinasi antar lembaga berjalan sangat baik. Informasi mengalir dengan cepat dan setiap pihak tahu peran mereka. Korban mendapatkan layanan komprehensif tanpa harus menceritakan trauma berulang kali".

Teknologi tidak hanya memfasilitasi koordinasi tetapi juga menjaga konsistensi informasi. AIPDA Adek F menambahkan, "Dengan shared database, semua pihak memiliki informasi yang sama dan up-to-date mengenai kondisi korban. Ini menghindari miscommunication dan memastikan intervensi yang konsisten". Konsistensi ini sangat penting dalam recovery proses korban.

Kasus 3: Edukasi Digital yang Mengubah Perilaku

Kasus ketiga menunjukkan impact dari edukasi digital yang dilakukan Polres Pelalawan. Pada Mei 2024, seorang remaja perempuan melaporkan percobaan kekerasan dalam pacaran setelah melihat konten edukasi di Instagram Polres Pelalawan.

BRIGADIR Anggun yang menangani laporan ini menceritakan, "Korban mengatakan dia awalnya tidak menyadari bahwa controlling behavior yang dialaminya termasuk kekerasan. Setelah melihat postingan kami tentang signs of abusive relationship, dia menyadari dan memutuskan untuk melapor".

Kasus ini menunjukkan bagaimana edukasi digital dapat meningkatkan awareness dan mendorong korban untuk speak up. Bapak Ahmad Fauzi dari LSM Pelalawan Peduli mengomentari, "Ini adalah bukti nyata bahwa edukasi berbasis media sosial efektif dalam mencapai generasi muda. Konten yang relevan dan mudah diakses dapat menjadi life-saving information".

Dari perspektif korban, Ibu Ratna yang merupakan teman dari pelapor menyatakan, "Saya juga belajar banyak dari konten-konten Polres. Sekarang saya lebih aware tentang healthy relationship dan tidak ragu untuk membantu teman yang mungkin mengalami kekerasan". Ripple effect dari edukasi digital melampaui individu yang langsung terpapar.

Dari ketiga kasus tersebut, Polres Pelalawan mengidentifikasi several key lessons yang dapat menjadi best practices bagi institusi lain:

1. Human-Centered Technology Design: Teknologi harus dirancang dengan focus pada kebutuhan korban dan petugas, bukan sebaliknya.
2. Multi-Stakeholder Collaboration: Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kolaborasi dengan LSM, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Incremental Implementation: Transformasi digital lebih berhasil ketika dilakukan secara bertahap dengan pilot project dan continuous improvement.
4. Capacity Building: Investasi dalam pelatihan dan change management sama pentingnya dengan investasi teknologi.
5. Data Privacy and Security: Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan melindungi data sensitif korban.
6. Continuous Evaluation: Regular assessment dan adaptation terhadap kebutuhan evolving sangat krusial untuk sustainability.

AIPDA M.T. Pakpahan menambahkan perspektif teknis, "Kami belajar bahwa scalability dan interoperability harus dipertimbangkan sejak awal desain sistem. Sistem yang kami bangun sekarang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem nasional jika diperlukan". Future-proof thinking ini memastikan investasi teknologi memberikan nilai jangka panjang.

D. Manfaat dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi di Polres Pelalawan telah memberikan berbagai manfaat dan dampak signifikan, tidak hanya bagi internal organisasi tetapi juga bagi masyarakat luas. Transformasi digital ini telah menciptakan perubahan fundamental dalam cara pelayanan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan secara keseluruhan.

Dampak positif ini terukur melalui berbagai indikator kinerja yang menunjukkan improvement substansial sejak implementasi teknologi dimulai. Namun di luar angka-angka, dampak yang paling berharga adalah perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kepolisian dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.

Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preanata merangkum dampak transformasi ini, "Teknologi telah menjadi game changer bagi kami. Dalam 3 tahun terakhir, kami melihat peningkatan signifikan dalam jumlah laporan, kecepatan respons, dan kepuasan korban. Namun yang paling membanggakan adalah berkurangnya stigma terhadap korban dan meningkatnya awareness masyarakat akan pentingnya melapor". Perubahan kultur ini merupakan impact paling berarti dari transformasi digital.

Bagi korban kekerasan, implementasi teknologi telah memberikan sejumlah manfaat langsung yang signifikan:

1. Aksesibilitas yang Lebih Baik

Korban dapat melapor kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Ibu Dina berbagi pengalamannya, "Saya bisa melapor tengah malam saat saya

merasa paling aman. Tidak harus menunggu besok pagi atau mencari alasan untuk pergi ke polisi".

2. Privasi dan Keamanan Terjamin

Sistem pelaporan online anonimitas memberikan rasa aman bagi korban yang khawatir dampak sosial dari pelaporan. BRIGADIR Anggun menjelaskan, "Banyak korban yang awalnya ragu menjadi terbuka setelah kami menjamin privasi data mereka. Ini sangat penting untuk kasus kekerasan domestik".

3. Respons yang Lebih Cepat

Waktu respons rata-rata berkurang dari 2 jam menjadi 22 menit setelah implementasi sistem terintegrasi. Ibu Ratna menyatakan, "Saya kaget responsnya sangat cepat. Dalam hitungan menit sudah ada petugas yang menghubungi dan memberikan panduan".

4. Informasi yang Komprehensif

Korban mendapatkan informasi lengkap mengenai hak, prosedur, dan available resources melalui platform digital. AIPDU Doni Harianto menambahkan, "Kami menyediakan knowledge base yang dapat diakses korban untuk memahami proses hukum dan hak-hak mereka".

5. Dukungan Berkelanjutan

Sistem memungkinkan tracking dan follow-up jangka panjang terhadap kondisi korban. AIPDA Adek F menjelaskan, "Kami memiliki sistem reminder untuk melakukan check-in berkala dengan korban, memastikan mereka mendapatkan dukungan berkelanjutan".

Dari perspektif internal Polres Pelalawan, teknologi informasi telah membawa berbagai improvement operational:

1. Efisiensi Operasional

Otomasi proses manual mengurangi waktu administrasi hingga 40%. AIPDA M.T. Pakpahan menjelaskan, "Proses yang dulu memakan waktu sehari-hari sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan jam berkat automasi".

2. Kualitas Data yang Lebih Baik

Basis data terpadu menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif untuk decision making. AIPDU Doni Harianto menambahkan, "Data quality improvement memungkinkan kami membuat keputusan yang lebih berbasis bukti".

3. Koordinasi yang Lebih Efektif

Sistem komunikasi internal meningkatkan kolaborasi antar unit. BRIGADIR Anggun menyatakan, "Sekarang informasi mengalir seamless antar unit, tidak ada lagi information silo".

4. Accountability yang Meningkat

Performance tracking memastikan setiap petugas bertanggung jawab atas tugasnya. AIPDA Adek F menjelaskan, "Dashboard transparan membuat semua petugas aware terhadap performance mereka".

5. Resource Optimization

Analytics membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya berdasarkan data dan tren. Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Preanata menambahkan, "Kami dapat mengalokasikan personil ke hotspot area berdasarkan prediksi data".

Di luar manfaat langsung bagi korban dan institusi, implementasi teknologi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas:

1. Meningkatnya Awareness Masyarakat

Edukasi digital telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan. Bapak Ahmad Fauzi dari LSM Pelalawan Peduli mengamati, "Kami melihat peningkatan awareness yang signifikan di masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan yang mungkin sebelumnya tidak disadari".

2. Berubahnya Persepsi terhadap Kepolisian

Teknologi telah membantu membangun citra kepolisian yang lebih modern dan responsif. Ibu Elsa Mariana dari LSM Save Women Pelalawan menyatakan, "Citra polisi di mata masyarakat berubah menjadi lebih accessible dan helpful".

3. Meningkatnya Kolaborasi Multi-Stakeholder

Platform digital telah memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar lembaga. Bapak Joko Santoso dari LSM YAKOMA Pelalawan menambahkan, "Kolaborasi menjadi lebih mudah dan efektif dengan adanya platform shared".

4. Reduksi Stigma terhadap Korban

Kampanye digital telah membantu mengurangi victim-blaming culture. Ibu Siti Nurhayati dari LSM Anak Ceria Pelalawan menjelaskan, "Kami melihat perubahan paradigma di masyarakat dari menyalahkan korban menjadi mendukung korban".

Dampak implementasi teknologi dapat diukur melalui berbagai metrik kuantitatif yang menunjukkan improvement signifikan:

Tabel 4. Comparative Performance Metrics Pre dan Post Implementation Teknologi

Metrik	Sebelum Implementasi (2021)	Setelah Implementation (2024)	Improvement
Jumlah Laporan per Bulan	15-20	25-30	+50%
Waktu Respons Rata-rata	120 menit	22 menit	-82%
Rasio Penyelesaian Kasus	72%	89%	+24%
Indeks Kepuasan Korban	3.2/5.0	4.3/5.0	+34%
Kasus Berulang dalam 6 Bulan	18%	7%	-61%
Engagement Media Sosial	500 reach/bulan	5,000 reach/bulan	+900%

Sumber :Polres Pelalawan

Data ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi informasi telah memberikan return yang signifikan tidak hanya dalam efisiensi operasional tetapi juga dalam impact sosial yang lebih luas.

Keberhasilan implementasi teknologi di Polres Pelalawan telah menciptakan foundation untuk pengembangan berkelanjutan. Rencana pengembangan future meliputi:

1. AI-Enhanced Risk Assessment: Implementasi machine learning untuk prediksi risiko yang lebih akurat.
2. Blockchain for Evidence Management: Penggunaan blockchain untuk integritas dan chain of custody bukti digital.

3. Virtual Reality for Training: Penggunaan VR untuk simulasi penanganan kasus yang lebih realistis.
4. Mobile App Expansion: Pengembangan aplikasi mobile dengan fitur geotagging dan emergency buttons.
5. Integration with National Systems: Interoperability dengan sistem nasional untuk data sharing yang lebih luas.

AIPTU Doni Harianto menjelaskan visi future ini, "Kami tidak berhenti pada achievement saat ini. Vision kami adalah menjadi model untuk pelayanan kepolisian berbasis teknologi di Indonesia. Kami terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat".

Transformasi digital di Polres Pelalawan membuktikan bahwa teknologi, ketika diimplementasikan dengan pendekatan human-centered dan multi-stakeholder collaboration, dapat menjadi powerful tool untuk menciptakan keharmonisasian dan keamanan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi informasi di Polres Pelalawan terbukti memainkan peran strategis dalam mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana penggunaannya mencakup aplikasi pelaporan digital, sistem database terpadu, dan media komunikasi berbasis teknologi yang memungkinkan pelacakan kasus secara real-time sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi dokumentasi. Keberhasilan penerapan ini ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan rutin petugas, kepemimpinan yang berorientasi inovasi, serta kerjasama lintas instansi seperti Dinas Komunikasi dan Informasi. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi sistem ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di level unit bawah, rendahnya kesadaran sebagian petugas dan masyarakat terhadap manfaat teknologi, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup intensifikasi pelatihan teknis dan analisis data bagi seluruh petugas, perluasan infrastruktur jaringan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan internet, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan fitur keamanan data pada sistem yang ada, serta pengembangan aplikasi pelaporan anonim guna mendorong lebih banyak korban berani melapor keseluruhannya dalam kerangka sinergi lintas sektor yang komprehensif dan terpadu.

REFERENSI

- Akbar, M Fikri, Hujaimatul Fauziah, Hafri Yuliani, and Henny Dewi Laras Ati. 2025. *Smart Communication for Smart Development Transformasi Digital Dalam Pembangunan*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Adawiah, R. A. (2024). Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(2), 77–92. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIK-AK/article/download/3026/1873/7748>
- Adi, D. A., Terttiavini, & Marcelina, D. (2023). Sistem informasi pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(2). <https://jutif.if.unsoed.ac.id/jutif/article/view/4761>
- Akbar, M. F., Fauziah, H., Yuliani, H., & Ati, H. D. L. (2025). *Smart communication for smart*

- development: Transformasi digital dalam pembangunan*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Amalia, A. N. (2025). Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesejahteraan sosial: Studi literatur. *Jurnal Ruang Sosialia (Ruang Ilmiah: Sosial dan Keagamaan)*, 1(1), 744–752.
- Annisa, R., & Adharani, Y. (2023). Sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis website (Studi kasus Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta). *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer (JUST-IT)*, 14(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/21320>
- Asfa, S., Rosalia, F., & Muflih, L. L. (2018). Strategi e-government dalam pelayanan sertifikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
- Azizah, D. A., & Sulistiani, D. (2024). Pendampingan korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak korban. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 5(1), 15–24. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/31448>
- Barus, R., Fardila, A., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Peran teknologi informasi dalam pengambilan keputusan strategis di lembaga pendidikan: Kajian sistematis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5505–5517.
- Gardenia Luthfia. (2022). *Regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual* [Skripsi, Universitas Airlangga]. Universitas Airlangga Repository. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116407>
- Khoiriyah, Z. A., Aini, F., Swara, Y. Y., Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2024). Sosialisasi pemahaman dan pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 63–75. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article/download/251/278/1470>
- Meslawika, T. Y. P., Wulandari, Y., & Mahendra, M. D. (2025). Peran dan tantangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung inovasi pendidikan di era digital. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 9(1), 202–221.
- Mufreni, S., & Rosida, L. (2021). Desain sistem informasi laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KtPA) berbasis Android, Google Firebase, dan web. *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 23(2), 76–86. <https://doi.org/10.14710/transmisi.23.2.76-86>
- Nurria, S., Pratama, M. B. P., & Syarifuddin. (2026). Menyeimbangkan dukungan dan tantangan: Peran kepala sekolah dalam perubahan kurikulum dan kemajuan teknologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1059–1068.
- Rahmad, N., & Anggita, S. O. (2025). Kolerasi antara dukungan infrastruktur dan optimalisasi hukum di Indonesia. *Jurnal Sutasoma*, 4(1), 13–18.
- Rojabi, M. A., & Kurniawan, D. (2026). *Digital Korlantas: Transformasi ekosistem layanan publik kepolisian di era baru*. Afdan Rojabi Publisher.
- S, A., Yamin, A., & Fietroh, M. N. (2024). Penerapan e-government melalui aplikasi identitas kependudukan digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188–193.
- Safitri, D. A., & Suherman, M. (2025). Komunikasi sebagai kunci pelayanan aduan: Analisis proses pada Jabar Quick Response. *Jurnal Riset Public Relations*, 69–78.
- Sarkosi, E. (2019). Aplikasi Go Sigap sebagai wujud peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 84–94.
- Sinaga, B. B., & Azzura, R. P. N. (2024). Peran teknologi blockchain sebagai instrumen pembangunan penegakan hukum berbasis digital dan mewujudkan masyarakat berkeadilan di era Society 5.0. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 71–82.
- Wahyudi, A. (2026). Peran teknologi informasi dalam supervisi pendidikan antara efisiensi dan hambatan. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(8), 894–912.
- Yonata, Y. (2025). Online dispute resolution (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa

bisnis di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 1–12.

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.